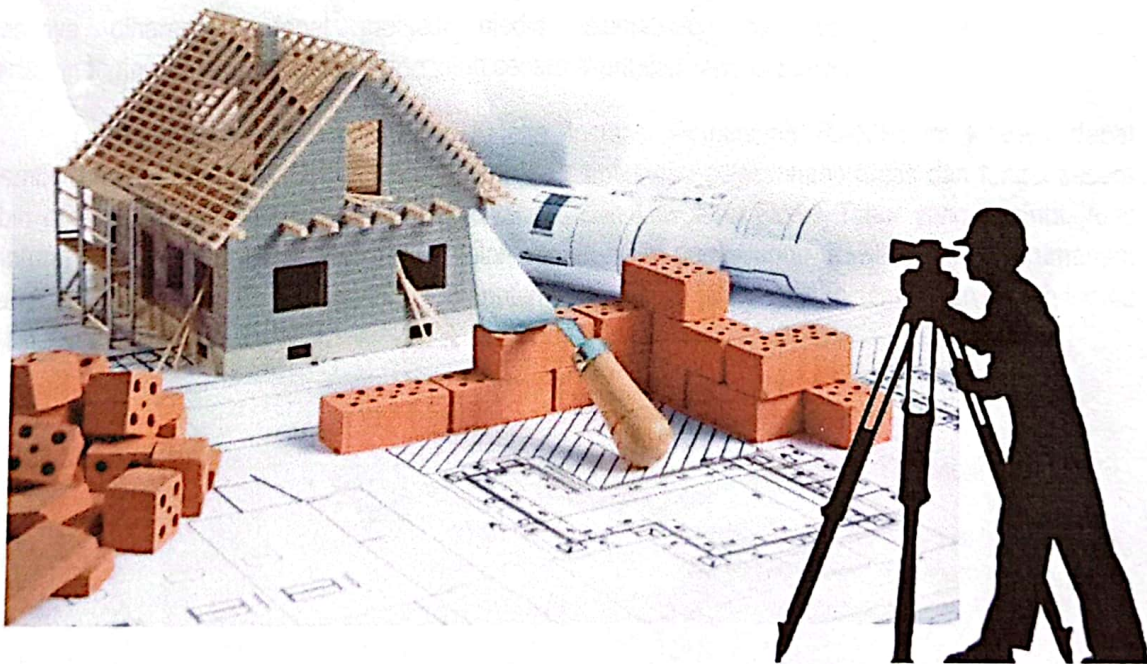




LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Sudah selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka instansi pemerintah diuntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang dalam penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tentang kinerja OPD selama tahun 2022. Hasilnya diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah secara akuntabel kepada publik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan kerjasama semua pihak yang telah mendukung penyusunan LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2021, disampaikan limpah terima kasih.

Larantuka, 17 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur


EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Daftar Isi		iii
BAB I : Pendahuluan		1
A. Latar Belakang		1
B. Gambaran Singkat Organisasi		2
C. Dasar Hukum		4
D. Sistematika Penyusunan		5
BAB II : Perencanaan Kinerja		6
A. Perencanaan		6
B. Perjanjian Kinerja		19
C. Penetapan Kinerja		19
BAB III : Akuntabilitas Kinerja		21
A. Capaian Kinerja Organisasi		21
B. Realisasi Anggaran		26
BAB IV : Penutup		27
Lampiran – lampiran		29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP ini dilakukan berdasarkan dokumen realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pengukuran capaian kinerja kegiatan tahun 2022 dengan menggunakan alat ukur dan evaluasi yang sistematis, obyektif, dan transparan dalam rangka kepastian dan akuntabilitas laporan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2022 secara total melaksanakan 6 Program dan 20 Sub Kegiatan. Hasil pengukuran kinerja secara umum pada tahun 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dengan detail Anggaran belanja sebesar Rp. 7.902.240.240,00.- untuk membiayai 8 Program dan 20 Sub Kegiatan, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.7.773.209.553,00.- atau prosentase capaian per 31 Desember 2021 adalah 98,37%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hasil pengukuran kinerja SKPD dalam skala ordinal temilai sangat baik.

Larantuka, 17 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya mengandung prinsip kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan keadilan. Keempat hal tersebut harus diwujudkan oleh sebuah daerah otonom seperti halnya Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pelayanannya kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu membentuk berbagai organisasi baik organisasi pemerintahan maupun kemasyarakatan yang memiliki konstelasi adanya pola kemitraan yang nyata sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhirnya terwujudnya good governance.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terbentuk dengan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 memiliki dukungan potensi sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas yang variatif untuk mendukung upaya pembangunan di sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tugas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang ada.

B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Dalam upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengemban Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut diatas menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Organisai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur terdiri dari unsur :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari sub bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, sub bagian Program, Data dan Evaluasi.
3. Pelaksana adalah bidang dan seksi yang terdiri dari :
 - a. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- Kepala Bidang PKP
- Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda
- b. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah
 - Kepala Bidang PPT
 - Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
 - Kepala bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
 - Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda

Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Kepegawaian :

Data jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur menurut eselon, pangkat / golongan dan pendidikan :

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian

No	Eselonering		Pangkat		Pendidikan	
	Eselon	Jumlah	Golongan	Jumlah	Tingkat	Jumlah
1	II.b	1	IV.c	1	S2	1
2	III.a	1	IV.b	1	S2	1
3	III.b	3	IV.a	2	S2	1
			IV.b		S1	1
			III.c	1	D4	1
4	IV.a	7	III.d	5	S1	4
					SLTA	1

			III.c	1	D3	1
			III.b	1	SLTA	1
5	Non eselon	7	III.a	3	S1	2
					SLTA	1
			II.d	2	SLTA	2
			II.c	1	D3	1
			II.a	1	SLTP	1
		19		19		19

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur .

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

I Permdahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran singkat Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika Penyusunan

II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Penetapan Kinerja

III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

IV Penutup

Lampiran – Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Rencana Strategis

Rencana strategis organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022. Visi misi Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

- a. Visi : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang efektif, merata dan terpadu.
- b. Misi : Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang akan dicapai melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada periode rencana strategi / Renstra Tahun 2018– 2022 sebagai berikut :
 - 1) Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good goverment
 - 2) Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan
 - 3) Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Tujuan dan Sasaran

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif
- b. Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas
- c. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan Fasilitas Publik
- d. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
- e. Terwujudnya inventarisasi masalah tanah di wilayah kabupaten

Sasaran :

- a. Meningkatnya pelayanan akan prasarana jalan dan Jembatan perdesaan
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan
- c. Meningkatnya ketersediaan lahan untuk pembangunan Fasilitas Publik
- d. Terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
- e. Terdatanya inventarisasi masalah tanah di wilayah kabupaten

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Keberadaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan

pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun pertama sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
 - b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
 - c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur belum optimal.
 - d. Data dan informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum optimal.
 - e. Peran aktif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat,

- b. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung
 - c. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
 - d. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - e. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
 - f. Sering terjadi banjir karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,
 - g. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.
3. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah dan Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
- a. Minimnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang ada, baik aparatur pemerintah Daerah maupun masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah
 - b. Terbatasnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan
 - c. Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah dan hak ulayat

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka langkah – langkah indikatif dan arah tindakan yang menjadi pedoman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama periode Renstra tahun 2018 – 2022 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Strategi dan Kebijakan :

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017 – 2022.

RUMUSAN PERNYATAAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD DALAM 5 TAHUN MENDATANG

VISI : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang efektif, merata dan terpadu.

Misi : 1. Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good government

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 2. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Pengembangan kemampuan dan Profesionalisme aparatur 4. Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kompetensi aparatur sesuai bidang tugasnya 4. Meningkatkan hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyediaan jasa administrasi perkantoran - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Penyelenggaraan Bimtek dan pelatihan formal 4. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan pelayanan Administrasi perkantoran 2. Meningkatkan pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur 4. Meningkatkan upaya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Misi : 2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan			
1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas 2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan permukiman yang berkualitas dan produktif	1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas 2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan permukiman yang berkualitas dan produktif	1. Penyediaan rumah layak huni 2. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman 3. Penyediaan prasarana, sarana permukiman	1. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi MBR 2. Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak 3. Meningkatkan akses jalan, jembatan listrik

Misi : 3. Mewujudkan pengelolaan pertanian secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanian

Mewujudkan pengelolaan pertanian secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanian	1. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah 2. Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanian 3. Terpenuhiya kebutuhan lahan untuk pembangunan	1. Penegakan status hukum tanah 2. Fasilitasi penyelesaian konflik, penyuluhan hukum pertanian dan Penyusunan Perda tentang pertanian 3. Meningkatkan luas lahan milik pemerintah	1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang leg pertanian 2. Penyuluhan Hukum dan penyusun Perda tentang pertanian 3. Pembebasan lahan
---	---	---	---

b. Program dan Kegiatan :

Program adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program / kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

b. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepeuluh) Ha

Sub Kegiatan :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

3) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

4) PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah/Kota

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepeuluh) Ha

Sub Kegiatan :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

3) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

4) PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah/Kota

5) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN

Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

6) PROGRAM REDRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Kegiatan : Penetapan Subjek dan Objek, Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

b. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan rencana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan
untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran. Adapun
rencana kerja anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2022 adalah :

URAIAN		Pagu Dana (Rp)
		7.902.240.240
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.910.404.557
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.300.877.757
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.839.800
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.644.780.492
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.995.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.965.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.980.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.400.000
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.992.465

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.925.000
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		2.300.877.000
<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</i>		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.300.877.000
3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		308.649.800
<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	308.649.800
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		2.991.835.683
4. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		34.999.700
<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah/Kota	34.999.700
5. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		2.901.835.983
<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.901.835.983
5. PROGRAM REDRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN		55.000.000

MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
Penetapan Subjek dan Objek, Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	55.000.000

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan sebuah pernyataan keseriusan sebuah instansi pelaksana program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja dengan Bupati Flores Timur. Substansi daripada perjanjian kinerja ini mempunyai muatan tanggung jawab instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja untuk dapat mencapai target kinerja sesuai perencanaan. Proses penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta penjabaran program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan OPD pada tahun yang bersangkutan dengan dukungan sejumlah anggaran yang dirinci secara detail pada masing – masing kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai bukti keseriusan pelaksanaan tugas oleh OPD penyelenggara program dan kegiatan maka dibuatlah perjanjian kinerja antara Bupati Flores Timur dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dalam lampiran LAKIP ini.

C. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen organisasi yang baik. Rencana kinerja akan menjadi pedoman bagi pemegang kendali manajemen organisasi dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diharapkan, dan dapat digunakan sebagai alat kontrol apakah organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai perencanaan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran berjalan perlu dimasukkan dalam dokumen penetapan rencana kinerja tahunan. Pada tahun 2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan 6 Program, 10 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang tersebar di tiga bidang dan dua sub bagian pada sekretariat dinas. Program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2022 disertakan dengan dukungan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan – kegiatan dimaksud agar dapat terealisasi secara baik pada tahun 2022. Rincian jumlah program dan kegiatan tahun 2022 dapat terekam dalam Tabel Penetapan Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan /kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Renstra OPD dan Penetapan Kinerja 2022.

Sasaran strategis

Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, menetapkan 6 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai.

1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas
2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas
3. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif
4. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
5. Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanahan
6. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi teknis yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berusaha untuk memanfaatkan sumber daya, anggaran dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dengan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur yang ada, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2022 telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Analisis tingkat keberhasilan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 dan perbandingan pencapaian pada tahun sebelumnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis secara terperinci dijabarkan menurut misi organisasi dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Visi	:	<i>"Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang efektif, merata dan terpadu."</i>
Misi 1	:	<i>Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good goverment</i>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2022		
			2020	2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good government	Tersedianya Aparatur yang berkualitas	Org	4	-	-	-	-

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2022		
			2020	2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan	Terlaksananya kegiatan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Unit	58	46	66	66	100 %
Terciptanya kawasan permukiman yang berkualitas dan produktif.	1. Meningkatkan volume konstruksi Jalan Lingkungan yang terbangun	Km	0,68 Km	0,5 km	1,96 Km	1,96 Km	100%

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Target pembangunan RTLH pada Tahun 2022 adalah 66 dengan realisasinya 66 Unit (100%) dari sumber dana DAK sebanyak 60 Unit Rumah dan APBD II 6 Unit Rumah. Dukungan anggaran DAK dan APBD II sebesar

Rp. 2.300.877.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.300.562.318,- atau capaiannya sebesar 99,99%

2. Program Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka penyediaan Prasarana sarana dan Utilitas Umum Perumahan Meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan Alokasi Anggaran APBD II Sebesar Rp. 308.649.800 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 308.360.000 atau Capaian 99,91 %.

Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2022		
			2020	2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengurangi dan Meminimalisir konflik pertanahan	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota	Kasus	4 Kasus	6 Kasus	3 Lokasi	3 Lokasi	100%
Bertambahnya Luas Tanah Pemda yang Dibebaskan	1. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Ha	4	5 Kec.	6 Bidang	6 Bidang	100%
	2. Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma	Buku	-	-	5 Bidang	5 Bidang	100%

	Agraria dalam 1 (Satu) Kab/Kota						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota, sasaran pencapaian target pada tahun 2022 adalah Meminimalisir Konflik Pertanahan Publik di Kabupaten Flores Timur. Jumlah Kecamatan yang dapat difasilitasi yaitu Kec.Wotanulumado,Kec.Adonara Timur,Kec.Ileboleng Ketersediaan pagu anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah Rp. 34.999.700,-dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 34.960.000,- atau Capaian 99.89 %.
2. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, sasaran pencapaian target pada tahun 2022 adalah 6 Bidang. Jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pendaftaran Tanah adalah Rp. 2.901.835.983 di alokasikan untuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota di 3 Bidang yaitu Desa Watotutu. Desa Mudakeputu, Desa Halakodanuhan dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.869.328.883,- atau Capaian 98,88%.
3. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kab/Kota . Jumlah pagu anggaran yang disediakan adalah Rp. 55.000.000,- di laksanakan di 3 Lokasi yang tersebar di kabupaten Flores Timur yaitu di Desa Saosina, Desa Nobo, Desa Lamalota dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 54.585.796,- atau Capaian 99,25%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2022 telah diupayakan dilakukan secara optimal dengan dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Total pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp. 7.902.240.240, Dengan detail Realisasi Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp. 7.773.209.553. atau prosentase capaian 98,37%. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2022 adalah Rp. 129.030.687,- atau 1,63% Penjabaran perbandingan antara target dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel realisasi keuangan tahun 2022. **(Lampiran 1)**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel. Melalui penyajian LAKIP ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur selama tahun 2022 dinilai sangat baik apabila dilihat dari pencapaian secara umum.

Menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun 2022, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin dengan membangun kesamaan persepsi dan kesatuan pemahaman terhadap semua persoalan dengan berbagai pihak yang berkompeten sehingga pada tahun – tahun mendatang pencapaian hasil akan lebih baik sesuai harapan.

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur secara umum melaksanakan 6 program, 10 Kegiatan dan 20 Sub kegiatan baik program OPD maupun program urusan dengan 6 sasaran yang hendak dicapai.

- b. Pengukuran capaian kinerja dipetakan menurut visi dan misi organisasi serta 6 sasaran strategis organisasi yang relevan pada 20 Sub kegiatan dilaksanakan pada tahun 2022. *Capaian kinerja terukur sebesar 98,37% dalam skala ordinal penilaian, dinilai sangat baik.*
- c. Hasil dari program dan kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2022 dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai target.
- d. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya : faktor intervensi masyarakat, mekanisme proses, alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, faktor kualitas / ketersediaan SDM pengelola kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan juga belum memadai.

Terhadap berbagai program dan kegiatan serta kendala yang dihadapi sebagaimana terjabar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengharapkan adanya informasi balik berupa masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dalam berbagai kebijakan yang senantiasa dapat dilaksanakan sesuai kondisi obyektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap dimensi. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan melalui laporan ini, kiranya dapat menjadi bahan informasi / evaluasi dan kajian untuk perencanaan pembangunan kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Larantuka, 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KA
KAB. FLORES TIMUR,


EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIA N	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIA N (%)	SISA ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Program Penunjang									
Urusan Pemerintah Daerah									
Kabupaten/Kota									
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6 Doc	6 Doc	70.839.800	70.711.510	99,82	8.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	1.644.780.492	1.561.751.122	94,95	83.029.370	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bln	12 Bln	50.000.000	49.970.000	99,94	30.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3 komponen	3 komponen	3.995.000	3.980.000	99,62	15.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK dan Alat Kebersihan Yang Di Sediakan	49 Jnis	49 Jnis	30.000.000	29.960.000	99,87	40.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan	350 Buku	350 Buku	15.000.000	15.000.000	100,00	-	
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	1.500.000	1.500.000	100,00	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum kantor	250 Dos	250 Dos	30.000.000	30.000.000	100,00	-	
	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi Dalam Daerah Dan Konsultasi Luar Daerah	65 Kali	65 Kali	168.965.000	168.691.580	99,84	273.420	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	150 Kali	150 Kali	1.500.000	1.500.000	100,00	-	

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jumlah Bulan Layanan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	25.980.000	16.698.344	64,27	9.281.656	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28 Orang	28 Orang	230.400.000	229.600.000	99,65	800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	4 unit	4 unit	21.992.465	20.150.000	91,62	1.842.465	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	3.000.000	3.000.000	100,00	-	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terpeliharanya Unit perlengkapan gedung kantor	2 unit	2 unit	2.925.000	2.900.000	99,15	25.000	
Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumum dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha							-	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tefasilitasinya Rumah Tidak Layak Huni	66 RTLH	66 RTLH	2.300.877.000	2.300.562.318	99,99	314.682	
Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	1,96 Km	1,96 Km	308.649.800	308.360.000	99,91	289.800	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	inventarisasi sengketa konflik dan perkara perantahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Konflik Perantahan yang difasilitasi	4 Kasus	4 Kasus	34.999.700	34.960.000	99,89	39.700	
Program Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk pembangunan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota							-	

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIA N	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang Difasilitasi	4,743 Ha	4,743 Ha	2.901.835.983	2.869.328.883	98,88	32.507.100	
Program Redistribusi Tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente								
	Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah Tanah Pemda yang difasilitasi	4 Bidang	4 Bidang	55.000.000	54.585.796	99,25	414.204	
J U M L A H					7.902.240.240	7.773.209.553	98,37	128.910.397	

Larantuka, 17 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur

Eduard J. Fernandez

EDUARD J. FERNANDEZ S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750410 199412 1 001